

Tingkat Pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Puskesmas Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2015

¹Risya Amalina, ²Titik Respati, ³Budiman

^{1,2,3}*Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Hariangbangga No.20 Bandung 40116

e-mail: ¹risyaamalinaa@gmail.com, ²titik.respati@gmail.com,

³budiman5rhh@gmail.com

Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejak program ini dijalankan tahun lalu banyak kendala dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai JKN dan mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN antara peserta PBI dan non PBI di Puskesmas Plered Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2015 kepada 200 responden yang merupakan peserta BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan non PBI (non Penerima Bantuan Iuran) dengan teknik sampel *consecutive*. Pengambilan data dilakukan dengan metode *cross-sectional* dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 18 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan terdiri dari tiga pilihan jawaban untuk mengumpulkan data berupa variabel faktor pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai JKN. Hasil analisis perbandingan tingkat pengetahuan JKN diperoleh bahwa ada sebanyak 74 (74%) responden memiliki pengetahuan kurang pada peserta PBI JKN, sedangkan pengetahuan baik hanya pada 8 (8%) peserta. Pada peserta non PBI JKN terdapat sebanyak 3 (3%) responden dengan pengetahuan kurang, sedangkan pengetahuan baik terdapat sebanyak 80 (80%). Hasil uji *chi square* di peroleh nilai *p-value* <0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN antara peserta PBI JKN dan non PBI JKN.

Kata kunci: JKN, Peserta BPJS Kesehatan, Tingkat pengetahuan.

Abstract. National Health Insurance (JKN) is a health insurance program organized by health social welfare board (BPJS). From the time the program was carried out, there are many obstacles in conducting it. This research aimed to describe the knowledge about National health insurance (BPJS) among participants and to identify different level of understanding concerning JKN between those who get free insurance (PBI) and those who do not (non PBI). The research was carried out in February 2015 to 200 respondents, 100 PBI and 100 non PBI health insurance participants, at Plered public health centre, Purwakarta. Consecutive sampling method used in this cross sectional study using questionnaires as data collecting tools. The result showed that 74 (74%) PBI participants have poor knowledge with only 8 (8%) who have good knowledge. From 100 respondents of non PBI participants, only (3%) have poor knowledge, whereas 80 (80%) have good knowledge. Statistical analysis using chi square showed the p value of <0.001. It can be concluded that there was a significant difference of knowledge about JKN between PBI participants and non PBI participants.

Key words: Health insurance BPJS participants, JKN, Knowledge

A. Pendahuluan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.¹

Terdapatnya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa

setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan program JKN yang mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yaitu dikelola secara kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien, efektifitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah, dan prinsip hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial.² Pelayanan Kesehatan dalam BPJS dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.³

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengetahuan masyarakat tentang JKN masih sangat minim terutama di daerah-daerah, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman peserta mengenai JKN. Pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas kesehatan akan dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan, dan sosial budaya. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperkaya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan layanan kesehatan, dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan tersebut maka derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.^{4,5}

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 930.691 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin adalah 220.578 jiwa. Berdasarkan laporan rekapitulasi pelayanan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Purwakarta tahun 2014 sebanyak 207.058 orang atau 85,8% menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional dan sebanyak 5,08% atau 10.524 jiwa menggunakan pemanfaatan pelayanan jaminan kesehatan nasional ini dilakukan di Puskesmas Plered.⁶

Jumlah penduduk yang berada di wilayah Puskesmas Plered tahun 2014 adalah 75.735 jiwa, sedangkan yang tercover oleh jaminan kesehatan nasional adalah 27.263 jiwa (12,36%). Jumlah peserta BPJS di Kabupaten Purwakarta sampai dengan bulan Oktober sebanyak 303.012 yang terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) 266.341 orang (87,90%) dan non PBI sebanyak 36.671 orang (12,10%). Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yang mendaftar menjadi peserta BPJS paling banyak terdapat di Kecamatan Plered, yaitu sebanyak 35.986 orang (11,87%) yang terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) 32.543 orang (90,43%) dan non PBI sebanyak 3.443 orang (9,57%).⁶

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta BPJS Kesehatan yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) adalah peserta BPJS kesehatan yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu.⁷ Berdasarkan laporan rekapitulasi jaminan kesehatan nasional Kabupaten Purwakarta tahun 2014 sebanyak 207.058 orang atau 85,8% menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional dan sebanyak 5,08% atau 10.524 jiwa menggunakan pemanfaatan pelayanan jaminan kesehatan nasional ini dilakukan di Puskesmas Plered, sementara jumlah peserta BPJS di Kabupaten Purwakarta Kecamatan Plered sebanyak 35.986 orang (11,87%). Angka ini menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta BPJS di Kabupaten Purwakarta Kecamatan Plered.⁶

Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apakah terdapat Perbandingan Tingkat Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Puskesmas Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2015.

B. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode analitik melalui pendekatan *cross sectional*. Pengambilan data menggunakan kuesioner tentang pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah di validasi, dan di uji reliabilitas. Hasil penelitian dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) 22.0.

C. Hasil

Distribusi responden berdasarkan karakteristik dapat dijelaskan tabel dibawah ini:

Tabel 1 Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik

Karakteristik	PBI N (%)	Non PBI N (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21 (21%)	14 (14%)
Perempuan	79 (79%)	86 (86%)
Pendidikan		
Tidak sekolah	13 (13%)	1 (1%)
SD	60 (60%)	19 (19%)
SMP	22 (22%)	28 (28%)
SMA	5 (5%)	34 (34%)
Diploma	0	3 (3%)
Sarjana	0	15 (15%)
Pekerjaan		
Buruh	4 (4%)	0
IRT	65 (65%)	57 (57%)
Tkg Ojeg	1 (1%)	0
Pedagang	2 (2%)	0
Petani	17 (17%)	0
PNS	0	6 (6%)
Swasta	4 (4%)	19 (19%)
Wiraswasta	7 (7%)	18 (18%)
Pendapatan		
<2.100.000	100 (100%)	1 (1%)
>2.100.000	0	99 (99%)
Total	100 (100%)	100 (100%)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa peserta BPJS Kesehatan mayoritas berjenis kelamin perempuan baik peserta PBI JKN maupun peserta non PBI JKN, yaitu 79 (79%) peserta PBI JKN dan 86 (86%) non PBI JKN. Pada peserta PBI JKN pendidikan yang terbanyak adalah tingkat SD sebanyak 60 orang (60%), sedangkan pada peserta non PBI JKN terdapat 34 orang (34%) setingkat SMA. Mayoritas responden pengguna JKN berdasarkan pekerjaan mayoritas adalah ibu rumah tangga terdapat 65 orang (65%) pada peserta PBI JKN sedangkan pada peserta non PBI JKN terdapat 57 orang (57%). Berdasarkan pendapatan semua (100%) pada peserta PBI JKN dengan pendapatan <2.100.000 sedangkan sebaliknya pada peserta non PBI JKN hanya satu responden yang mempunyai pendapatan <2.100.000.

Tabel 2 Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kelompok	Mean	(SD)
PBI	37,32	(10,55)
Non PBI	32,56	(9,53)

Pada tabel 2, memperlihatkan rata-rata usia peserta PBI JKN lebih tua dibandingkan peserta non PBI JKN, yaitu sebesar 37,32 pada peserta PBI dan peserta non PBI sebesar 32,56.

Perbandingan pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Perbandingan Pengetahuan JKN Peserta PBI dan Non PBI

Kepesertaan	Pengetahuan			Nilai P
	Kurang	Cukup	Baik	
PBI N (%)	74 (74%)	18 (18%)	8 (8%)	< 0,001*
Non PBI N (%)	3 (3%)	17 (17%)	80 (80%)	

Berdasarkan tabel 4.3, hasil analisis perbandingan pengetahuan tentang JKN diperoleh bahwa sebagian besar peserta PBI JKN 74 (74%) responden memiliki pengetahuan yang kurang, sedangkan peserta non PBI JKN memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 80 (80%) dan dari hasil uji statistik diperoleh *p-value* < 0,001, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN yang bermakna antara peserta PBI dan non PBI.

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 200 responden yang terdiri dari 100 peserta PBI dan 100 peserta non PBI diperoleh bahwa ada sebanyak 74 (74%) responden dengan pengetahuan kurang pada peserta PBI JKN, sedangkan pengetahuan baik terdapat sebanyak 8 (8%). Pada peserta non PBI JKN terdapat sebanyak 3 (3%) responden dengan pengetahuan kurang, sedangkan pengetahuan baik terdapat sebanyak 80 (80%). Hasil uji statistik yang dilakukan menggunakan *chi-square test* di peroleh *p-value* < 0,001, maka dapat disimpulkan terdapat perbandingan tingkat pengetahuan tentang JKN yang bermakna antara peserta PBI JKN dan non PBI JKN.

Hasil penelitian mengenai pengetahuan responden menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan mengenai JKN di Puskesmas Plered

Kabupaten Purwakarta. Menurut Notoatmodjo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pada seseorang yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya terdiri dari umur, pendidikan dan pekerjaan dan faktor eksternal diantaranya faktor lingkungan dan social budaya.⁷ Hal ini sesuai dengan yang ditemukan penulis mengenai faktor yang mempengaruhi pengetahuan, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa rata-rata usia peserta BPJS PBI lebih tua dibandingkan peserta BPJS non PBI, yaitu sebesar 37,32 pada peserta PBI dan peserta non PBI sebesar 32,56. Sebagian besar peserta BPJS PBI yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tingkat SD sebanyak 60 orang (60%), sedangkan pada peserta non PBI terdapat 34 orang (34%) setingkat SMA dan responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, master ataupun doktor hanya sebesar 7 orang (7%) dan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih banyak peserta BPJS Kesehatan PBI yang kurang mengetahui mengenai JKN dibandingkan dengan peserta BPJS Kesehatan non PBI. Selain itu menurut peneliti faktor lain seperti lingkungan dan sosial budaya juga mempengaruhi penelitian ini, karena di daerah Plered Purwakarta akses masyarakat mengenai informasi yang didapat masih terbatas dan budaya masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tokoh masyarakat sehingga informasi mengenai JKN masih kurang maksimal. Dari pembahasan diatas, penelitian ini mendukung teori mengenai faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo.

Pengetahuan seorang individu erat kaitannya dengan perilaku yang akan diambilnya, karena dengan pengetahuan tersebut ia memiliki alasan dan landasan untuk menentukan suatu pilihan.⁸

Menurut peneliti pengetahuan responden tentang JKN yang termasuk kedalam kategori baik dapat mempengaruhi tindakan responden sebagai peserta JKN dalam menggunakan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur pelayanan JKN dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang termasuk kedalam program JKN. Begitu pula sebaliknya jika pengetahuan responden tentang JKN kurang, maka akan berpengaruh pada kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tersedia dan kurangnya penggunaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur pelayanan JKN, sehingga dapat menyebabkan kurang efektifnya program pelaksanaan JKN. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut Sebayang (2005) dalam penelitiannya menyebutkan adanya hubungan bermakna antara pengetahuan masyarakat dengan pemanfaatan Puskesmas. Masyarakat dengan pengetahuan tinggi tentang JPKMM berpeluang 5722 kali memanfaatkan pelayanan Puskesmas dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan rendah.⁹

E. Kesimpulan

1. Tingkat pengetahuan peserta PBI JKN secara umum masih kurang.
2. Tingkat pengetahuan pada peserta non PBI JKN secara umum sudah baik.
3. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN yang bermakna antara peserta PBI dan non PBI.

Daftar Pustaka

- Peraturan Presiden No. 12 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Republik Indonesia [Internet]. 2013[diunduh 14 Desember 2014]. Terdapat pada: <http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment-/unduh/Perpres No. 12 Th 2013 ttg Jaminan Kesehatan.pdf>.
- Permenkes RI No. 903/Menkes/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat [Internet]. 2011[diunduh 14 Desember 2014]. Terdapat pada: <http://www.scribd.com/doc/60428536-/Pedoman-Pelaksanaan-Jamkesmas-2011#scribd>.
- Permenkes RI No. 28 Tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional [Internet]. 2014[diunduh 14 Desember 2014]. Terdapat pada: <http://www.depkes.go.id/resources/download-/general/PMK No. 28 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN.pdf>
- Ayuning Tyas I. Hubungan pengetahuan dengan sikap kepala keluarga tentang program jaminan kesehatan nasional. 2009[diunduh 31 Januari 2015]. Terdapat pada: <http://www.perpusnwu.web.id/karyailmiah-/documents/3624-.pdf>
- Trisnantoro L, Hendrartini Y, Susilowati T, Meliala A, Kurniawan M., Putra. Laporan Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? 2014[diunduh 31 Januari 2015]. Terdapat pada: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article-/1988>.
- Data Profil Dinas Kesehatan Mengenai Sasaran dan Target SPM Bidang Kesehatan PerPuskesmas Tahun 2014.
- Wawan, A MD. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Prilaku. Yogyakarta: Nuha Medika; 2010.
- Maabuat C. L. L, Maramis F. R. R, Sondakh R. C. Hubungan Antara Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil Manado Tahun 2013. 2013.[diunduh 25 Juni 2015]. Terdapat pada: <http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/-uploads/2014/03/christin-maabuat.pdf>.
- Sebayang, Ribka. Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Oleh Keluarga Miskin Peserta Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin (JPKMM) Di Wilayah Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2005. 2005.[diunduh 12 Juli 2015]. Terdapat pada: <http://lib.ui.ac.id/file?file=-pdf/abstrak-113914.pdf>.